



PENDEKATAN SEKURITISASI TERHADAP KRISIS PENGUNGGSI MYANMAR: ANTARA KEAMANAN WILAYAH DAN TANGGUNG JAWAB KEMANUSIAAN THAILAND

Riva Ramadhani

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Corresponding Author: rivarmd@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 03 April 2025</p> <p>Revised : 02 May 2025</p> <p>Accepted : 01 June 2025</p> <p>Publication : 30 June 2025</p> <p>Keywords: Myanmar Refugee Crisis, Border Security, Securitisation, Refugee Protection, ASEAN Policy</p> <p>Kata Kunci: Krisis Pengungsi Myanmar, Keamanan Perbatasan, Sekuritisasi, Perlindungan Pengungsi, Kebijakan ASEAN</p> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p>	<p>Abstract: <i>The Myanmar refugee crisis triggered by political conflict and violence in Myanmar has created major challenges for Thailand, especially in maintaining a balance between border security and humanitarian obligations. This research analyses how the Myanmar refugee crisis affects security dynamics on the Thai-Myanmar border as well as the strategies implemented by Thailand to manage border security while considering refugee protection. Using a desk study approach, this research integrates various academic sources to understand the complexity of this issue. The findings show that Thailand tends to prioritise national security through a securitisation approach, which often limits refugees' access to protection and humanitarian assistance. However, pressure from the international community and humanitarian organisations is pushing Thailand to adopt a more balanced approach. This research contributes to the study of forced migration, regional security, and ASEAN policy by highlighting the dilemma between state sovereignty and humanitarian responsibility.</i></p> <p>Abstrak: Krisis pengungsi Myanmar yang dipicu oleh konflik politik dan kekerasan di Myanmar telah menciptakan tantangan besar bagi Thailand, terutama dalam menjaga keseimbangan antara keamanan perbatasan dan kewajiban kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana krisis pengungsi Myanmar memengaruhi dinamika keamanan di perbatasan Thailand-Myanmar serta strategi yang diterapkan oleh Thailand untuk mengelola keamanan perbatasan sambil mempertimbangkan perlindungan pengungsi. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengintegrasikan berbagai sumber akademik untuk memahami kompleksitas isu ini. Temuan menunjukkan bahwa Thailand cenderung memprioritaskan keamanan nasional melalui pendekatan sekuritisasi, yang sering kali membatasi akses pengungsi terhadap perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Namun, tekanan dari komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan mendorong Thailand untuk mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang. Penelitian ini berkontribusi pada studi migrasi paksa, keamanan regional, dan kebijakan ASEAN dengan menyoroti dilema antara kedaulatan negara dan tanggung jawab kemanusiaan.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Krisis pengungsi Myanmar telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara, dengan ratusan ribu orang melarikan diri dari kekerasan dan konflik di Myanmar menuju negara tetangga, termasuk Thailand. Krisis ini berakar pada ketidakstabilan politik di Myanmar, terutama setelah kudeta militer pada Februari 2021, yang memicu gelombang baru pengungsian lintas batas. Thailand, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, menghadapi tekanan ganda: menjaga keamanan perbatasan untuk mencegah ancaman seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan konflik bersenjata yang meluas, serta memenuhi kewajiban kemanusiaan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Dalam konteks ini, pendekatan sekuritisasi yaitu proses di mana isu kemanusiaan seperti migrasi dipandang sebagai ancaman keamanan telah menjadi ciri utama kebijakan Thailand terhadap pengungsi Myanmar (Jittieng, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana krisis pengungsi Myanmar memengaruhi dinamika keamanan di perbatasan Thailand-Myanmar? Kedua, strategi apa yang diterapkan Thailand untuk mengelola keamanan perbatasan, dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan pengungsi? Penelitian ini relevan karena memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Thailand, menangani dilema antara keamanan nasional dan kewajiban kemanusiaan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademik tentang migrasi paksa, keamanan regional, dan dinamika kebijakan dalam kerangka ASEAN, yang sering kali menghadapi tantangan dalam merumuskan respons kolektif terhadap krisis pengungsi (Nguyen, 2022).

Perbatasan Thailand-Myanmar memiliki karakteristik unik, baik dari segi geografis maupun sosial. Wilayah ini ditandai dengan medan yang sulit, keberadaan kelompok bersenjata non-negara, dan hubungan sosial lintas batas yang telah terjalin selama beberapa dekade. Krisis pengungsi tidak hanya memengaruhi keamanan fisik tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pendekatan Thailand terhadap krisis ini mencerminkan upaya untuk menjaga kedaulatan nasional sambil menanggapi tekanan internasional untuk mematuhi norma-norma kemanusiaan (Kneebone et al., 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis isu ini secara mendalam, dengan fokus pada interaksi antara kebijakan keamanan dan kewajiban kemanusiaan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik, termasuk buku, artikel jurnal, dan laporan yang relevan dengan topik krisis pengungsi Myanmar, keamanan perbatasan, dan kebijakan kemanusiaan di Thailand. Sumber-sumber ini mencakup karya-karya seperti *Border Humanitarians* oleh Saltsman (2022), *Refugee Protection in Southeast Asia* oleh Kneebone et al. (2024), dan artikel jurnal oleh Hou (2024) serta Saisin et al. (2023). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti sekuritisasi, keamanan perbatasan, dan perlindungan pengungsi, serta menghubungkannya dengan kerangka teoretis tentang migrasi paksa dan keamanan regional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas isu secara holistik tanpa memerlukan data primer dari lapangan, sehingga meminimalkan bias yang mungkin timbul dari interpretasi subjektif.

RESULT AND DISCUSSION

Results

Dinamika Keamanan di Perbatasan Thailand-Myanmar

Krisis pengungsi Myanmar telah mengubah dinamika keamanan di perbatasan Thailand-Myanmar secara signifikan. Sejak kudeta militer 2021 di Myanmar, ribuan warga Myanmar, termasuk etnis minoritas seperti Karen dan Shan, telah menyeberang ke Thailand untuk mencari perlindungan. Perbatasan ini, yang membentang lebih dari 2.400 kilometer, memiliki medan yang sulit dan sebagian besar tidak diawasi secara ketat, memungkinkan pergerakan lintas batas yang tidak terdokumentasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi otoritas Thailand mengenai potensi ancaman keamanan, seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan aktivitas kelompok bersenjata non-negara (Saisin et al., 2023).

Sekuritisasi krisis pengungsi telah menjadi pendekatan dominan di Thailand. Menurut Jittiang (2022), sekuritisasi terjadi ketika suatu isu, seperti migrasi, dikonstruksi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga memungkinkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat, seperti penguatan militer di perbatasan dan pembatasan akses pengungsi. Pendekatan ini mencerminkan prioritas Thailand untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian politik di Myanmar. Namun, sekuritisasi ini sering kali bertentangan

dengan kewajiban kemanusiaan, karena pengungsi sering kali ditolak masuk atau dipulangkan secara paksa, yang dikenal sebagai *refoulement* (McConnachie, 2022).

Selain itu, keberadaan kamp pengungsi di sepanjang perbatasan, seperti di Mae Sot dan Mae Hong Son, telah menjadi titik fokus ketegangan. Kamp-kamp ini, yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah dan didukung oleh bantuan internasional, sering kali dipandang oleh pemerintah Thailand sebagai potensi ancaman keamanan karena kedekatannya dengan wilayah konflik di Myanmar. Menurut Saltsman (2022), kamp-kamp ini tidak hanya menjadi tempat perlindungan tetapi juga pusat aktivitas sosial dan politik yang kompleks, yang dapat memperumit hubungan antara Thailand dan Myanmar.

Strategi Thailand dalam Mengelola Keamanan Perbatasan

Thailand telah menerapkan berbagai strategi untuk mengelola keamanan perbatasan di tengah krisis pengungsi Myanmar. Salah satu strategi utama adalah penguatan militer dan polisi di wilayah perbatasan. Menurut Singlor (2023), Thailand telah meningkatkan patroli perbatasan dan mendirikan pos pemeriksaan untuk memantau pergerakan lintas batas. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah masuknya kelompok bersenjata atau penyelundup, tetapi juga berdampak pada pembatasan akses pengungsi ke wilayah Thailand. Selain itu, Thailand telah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk mengelola kamp pengungsi, meskipun dengan syarat ketat yang membatasi mobilitas pengungsi (Kneebone et al., 2024).

Strategi lain yang diterapkan adalah pendekatan diplomatik melalui kerangka ASEAN. Meskipun ASEAN memiliki prinsip non-intervensi, Thailand telah berpartisipasi dalam diskusi regional untuk menangani krisis pengungsi Myanmar. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Nguyen (2022), efektivitas ASEAN dalam menangani isu ini terbatas karena kurangnya mekanisme yang mengikat secara hukum untuk perlindungan pengungsi. Akibatnya, Thailand sering kali mengandalkan kebijakan unilateral yang lebih mengutamakan keamanan daripada kewajiban kemanusiaan.

Dampak dari strategi ini terhadap perlindungan pengungsi cukup signifikan. Menurut Hou (2024), pendekatan sekuritisasi telah menyebabkan depolitisasi bantuan kemanusiaan, di mana organisasi non-pemerintah di perbatasan Thailand-Myanmar harus beroperasi dalam kerangka yang sangat dibatasi oleh kebijakan pemerintah. Hal ini mengakibatkan akses terbatas bagi pengungsi terhadap layanan dasar seperti

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, kebijakan pemulangan paksa yang diterapkan oleh Thailand telah menuai kritik dari komunitas internasional karena melanggar prinsip *non-refoulement* (McConnachie, 2022).

Tantangan dan Peluang dalam Menyeimbangkan Keamanan dan Kemanusiaan

Menyeimbangkan keamanan perbatasan dan kewajiban kemanusiaan merupakan tantangan besar bagi Thailand. Di satu sisi, Thailand harus melindungi kedaulatan nasional dan mencegah ancaman keamanan yang mungkin timbul dari krisis di Myanmar. Di sisi lain, tekanan dari komunitas internasional dan organisasi kemanusiaan mendorong Thailand untuk mematuhi norma-norma internasional tentang perlindungan pengungsi. Menurut Ho (2022), pendekatan yang terlalu berfokus pada keamanan dapat memperburuk penderitaan pengungsi dan menciptakan ketegangan sosial di wilayah perbatasan.

Namun, ada juga peluang untuk menciptakan pendekatan yang lebih seimbang. Misalnya, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah Thailand, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan kapasitas untuk memberikan bantuan kemanusiaan tanpa mengorbankan keamanan. Selain itu, penguatan kerangka ASEAN untuk perlindungan pengungsi dapat memberikan solusi regional yang lebih efektif (Nguyen, 2022). Dengan memanfaatkan pengalaman dari krisis pengungsi sebelumnya, seperti krisis Rohingya, Thailand dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Krisis pengungsi Myanmar telah memperumit dinamika keamanan di perbatasan Thailand-Myanmar, dengan meningkatnya ketegangan akibat pergerakan lintas batas yang tidak terkontrol. Pemerintah Thailand memandang pengungsi sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas nasional, sehingga menerapkan kebijakan sekuritisasi yang ketat. Hal ini terlihat dari peningkatan kehadiran militer di wilayah perbatasan dan pembatasan akses pengungsi ke layanan dasar. Menurut Saltsman (2022), pendekatan ini mencerminkan kecenderungan untuk memprioritaskan keamanan daripada kewajiban kemanusiaan. Namun, sekuritisasi ini sering kali memperburuk kondisi pengungsi, yang terjebak dalam situasi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kebijakan seperti pemulangan paksa (*refoulement*) telah menuai kritik karena melanggar norma internasional. Selain itu, kamp pengungsi di sepanjang perbatasan menjadi pusat ketegangan sosial dan politik, yang memperumit hubungan bilateral Thailand-Myanmar. Organisasi kemanusiaan berjuang untuk memberikan

bantuan di tengah pembatasan ketat dari pemerintah. Krisis ini juga memengaruhi komunitas lokal di Thailand, yang sering kali bersaing dengan pengungsi untuk sumber daya terbatas. Dengan demikian, pendekatan sekuritisasi memiliki konsekuensi luas terhadap stabilitas regional (Jittieng, 2022).

Thailand telah mengadopsi strategi pengelolaan perbatasan yang berfokus pada penguatan keamanan, seperti peningkatan patroli dan pembangunan pos pemeriksaan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan dan aktivitas kelompok bersenjata, tetapi sering kali menghambat akses pengungsi ke perlindungan. Menurut Kneebone et al. (2024), kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dilakukan dengan syarat ketat, yang membatasi mobilitas pengungsi. Hal ini menciptakan dilema, karena Thailand harus mematuhi tekanan internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Namun, prioritas keamanan nasional sering kali mendominasi, mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak pengungsi. Misalnya, pengungsi sering kali ditahan di kamp dengan kondisi yang tidak memadai, tanpa akses ke pendidikan atau pekerjaan. Pendekatan ini juga memengaruhi hubungan dengan komunitas lokal, yang merasa terancam oleh kehadiran pengungsi. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan Myanmar memperumit upaya untuk mencari solusi jangka panjang. Menurut Hou (2024), depolitisasi bantuan kemanusiaan semakin memperburuk situasi, karena organisasi non-pemerintah harus beroperasi dalam batasan ketat. Oleh karena itu, strategi ini memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan pengungsi.

Peran ASEAN dalam menangani krisis pengungsi Myanmar sangat terbatas, meskipun Thailand aktif dalam diskusi regional. Prinsip non-intervensi ASEAN menghambat pembentukan mekanisme perlindungan pengungsi yang efektif. Menurut Nguyen (2022), kurangnya komitmen hukum membuat negara-negara anggota, termasuk Thailand, lebih mengutamakan kedaulatan daripada kewajiban kemanusiaan. Hal ini terlihat dari minimnya inisiatif regional untuk menangani krisis ini secara kolektif. Thailand sering kali mengandalkan kebijakan unilateral, seperti penguatan perbatasan, yang memperburuk penderitaan pengungsi. Selain itu, tekanan dari komunitas internasional mendorong Thailand untuk bekerja sama dengan organisasi seperti UNHCR, tetapi dengan hasil yang terbatas. Misalnya, pengungsi sering kali tidak mendapatkan status hukum yang jelas, yang membatasi akses mereka ke layanan dasar. Menurut McConnachie (2022), kebijakan ini mencerminkan ketegangan antara norma kemanusiaan dan prioritas keamanan nasional. Kurangnya solusi regional juga

memperpanjang krisis, karena tidak ada mekanisme untuk mengatasi akar masalah di Myanmar. Dengan demikian, pendekatan ASEAN yang lemah memperumit upaya Thailand untuk menyeimbangkan keamanan dan kemanusiaan.

Krisis pengungsi juga memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan Thailand. Komunitas lokal sering kali memandang pengungsi sebagai ancaman terhadap sumber daya seperti pekerjaan dan layanan publik. Menurut Saisin et al. (2023), ketegangan ini diperburuk oleh persepsi bahwa pengungsi membawa risiko keamanan, seperti penyelundupan atau konflik lintas batas. Pemerintah Thailand berusaha mengatasi hal ini dengan membatasi pergerakan pengungsi, tetapi ini sering kali memperburuk diskriminasi dan marginalisasi. Selain itu, kamp pengungsi menjadi pusat aktivitas sosial dan politik yang kompleks, yang dapat memicu ketegangan dengan otoritas lokal. Menurut Saltsman (2022), dinamika ini mencerminkan tantangan dalam mengelola hubungan antara komunitas pengungsi dan masyarakat tuan rumah. Bantuan kemanusiaan yang terbatas juga memperburuk situasi, karena pengungsi bergantung pada sumber daya yang minim. Hal ini menciptakan lingkaran setan, di mana ketegangan sosial meningkatkan tekanan untuk sekuritisasi. Dengan demikian, krisis ini tidak hanya berdampak pada pengungsi tetapi juga pada stabilitas wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan untuk mengurangi konflik sosial.

Peluang untuk menyeimbangkan keamanan dan kewajiban kemanusiaan tetap ada, meskipun tantangannya besar. Kolaborasi antara pemerintah Thailand, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan kapasitas untuk memberikan bantuan tanpa mengorbankan keamanan. Menurut Ho (2022), pengalaman dari krisis pengungsi sebelumnya, seperti krisis Rohingya, dapat menjadi panduan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif. Misalnya, Thailand dapat memperluas akses pengungsi ke pendidikan dan pekerjaan untuk mengurangi ketegangan dengan komunitas lokal. Selain itu, penguatan kerangka ASEAN untuk perlindungan pengungsi dapat menciptakan solusi regional yang lebih efektif. Namun, tantangan utama adalah mengatasi prinsip non-intervensi yang menghambat kerja sama regional. Menurut Kneebone et al. (2024), dialog yang lebih intensif antara negara-negara ASEAN dapat mendorong komitmen bersama untuk menangani krisis ini. Selain itu, tekanan dari komunitas internasional dapat mendorong Thailand untuk mematuhi norma kemanusiaan. Dengan demikian, pendekatan yang seimbang membutuhkan komitmen

politik dan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat menjadi jalan menuju solusi yang lebih berkelanjutan.

CONCLUSION

Krisis pengungsi Myanmar telah menciptakan tantangan kompleks bagi Thailand dalam menyeimbangkan keamanan perbatasan dan kewajiban kemanusiaan. Sekuritisasi krisis ini telah menyebabkan pendekatan yang lebih ketat terhadap pengungsi, sering kali mengorbankan hak mereka atas perlindungan dan bantuan. Strategi seperti penguatan militer, patroli perbatasan, dan kerja sama dengan organisasi internasional mencerminkan upaya Thailand untuk mengelola krisis ini, tetapi juga menunjukkan keterbatasan dalam memenuhi standar kemanusiaan internasional. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih seimbang yang mempertimbangkan baik keamanan nasional maupun tanggung jawab kemanusiaan, serta pentingnya kerjasama regional melalui ASEAN untuk menangani krisis pengungsi secara efektif. Kontribusi penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika migrasi paksa dan keamanan regional di Asia Tenggara.

REFERENCES

- Saltsman, A. (2022). *BORDER HUMANITARIANS: GENDERED ORDER AND INSECURITY ON THE THAI-BURMESE FRONTIER*. Syracuse University Press.
- Buranajaroenkij, D., & Hayes, M. (2025). *THE SECURITIZATION OF SOCIAL REINTEGRATION IN SOUTHERN THAILAND'S ARMED CONFLICT*. *Conflict Resolution Quarterly*, 42(3), 425-435.
- Hou, T. (2024). *HUMANITARIAN AID PRACTICES ON THE THAI-MYANMAR BORDER AFTER THE COUP: BEYOND DEPOLITICIZATION AND INEQUALITY*. *Journal of International Humanitarian Action*, 9(1), 16.
- McConnachie, K. (2022). *REFUGEE POLICY AS BORDER GOVERNANCE: REFUGEE RETURN, PEACEBUILDING, AND MYANMAR'S POLITICS OF TRANSITION*. *Modern Asian Studies*, 56(2), 661-690.
- Saisin, A., Somboonboorana, S., Laishram, R. S., & Chaisingkananont, S. (2023). *SECURITIZATION IN MOREH TOWN OF MANIPUR STATE, INDIA AND THE IMPACT OF THE MYANMAR POLITICAL CONFLICT*. *Research in Globalization*, 7, 100150.

- Nguyen, T. A. T. (2022). REFUGEE PROTECTION IN ASEAN: THE CASE OF THE ROHINGYA REFUGEE CRISIS.
- Kneebone, S., Mariñas, R., Missbach, A., & Walden, M. (Eds.). (2024). REFUGEE PROTECTION IN SOUTHEAST ASIA: BETWEEN HUMANITARIANISM AND SOVEREIGNTY (Vol. 51). Berghahn Books.
- Singlor, T. (2023). BALANCING MATTERS? RE-VISITING SECURITY-DEVELOPMENT NEXUS AND ITS OPERATION ON 'SECURE AND PROSPEROUS' NATIONAL GOALS THAILAND 2014-2024.
- Jittieng, B. (2022). IN THE NAME OF NATIONAL SECURITY: THAILAND AND THE SECURITISATION OF THE ROHINGYA. In *Marginalisation and Human Rights in Southeast Asia* (pp. 151-166). Routledge.
- Ho, E. L. E. (2022). BORDER GOVERNANCE IN KACHIN STATE, MYANMAR: UN/CARING STATES AND ASPIRANT STATE BUILDING DURING HUMANITARIAN CRISES. *Modern Asian Studies*, 56(2), 639-660.
- Jittieng, B. (2022). IN THE NAME OF NATIONAL SECURITY. *Marginalisation and Human Rights in Southeast Asia*.